

Jokowi Bagikan SK Hutan Sosial dan Sertifikat Tanah di Sumut

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan sejumlah sertifikat tanah pada warga saat melakukan kunjungan kerja hari kedua di Provinsi Sumatera Utara, Kamis (3/2).

Dengan menyeberang dari Pelabuhan Ambarita, Kabupaten Samsir, Jokowi beserta rombongan menuju Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba. Dengan menumpang KMP Kaldera Toba, Presiden dan rombongan lepas sauh sekitar pukul 08.00 WIB.

Dari Pelabuhan Ajibata, Presiden akan melanjutkan perjalanan ke Bandara Sibisa, Kabupaten Toba, untuk kemudian lepas landas menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju helipad Kantor Bupati Humbang Hasundutan.

Di Kabupaten Humbang Hasundutan, Presiden diwajibkan untuk melakukan penanaman pohon di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja. Tak jauh dari lokasi penanaman pohon, Presiden juga akan membagikan Surat Keputusan (SK) Hutan

Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Selepas acara, Presiden akan kembali menuju helipad Kantor Bupati Humbang Hasundutan untuk kemudian lepas landas dengan helikopter menuju helipad Stadion Utama Sidalang, Kabupaten Dairi. Kepala Negara kemudian akan menuju Lapangan Sudirman untuk menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat.

Presiden juga direncanakan akan membagikan bantuan langsung tunai bagi para pedagang di Pasar Induk Sidalang sebelum kemudian lepas landas menuju Pangkalan Udara Soewondo, Kota Medan, dengan menggunakan helikopter.

Turut menyertai Presiden dalam kunjungan kerja kali ini yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. ● han

Empat Anggota DPR Komisi V Meninggal Akibat Covid-19, Rapat Bakal Dilakukan Virtual

JAKARTA (IM) - Empat alat kelengkapan dewan (AKD) DPR yakni, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Komisi I, Komisi III dan ruang para Wakil Ketua DPR di lantai 4 Gedung Nusantara 3 menghentikan sementara kegiatan fisiknya atau lockdown.

Lockdown dilakukan karena banyak anggota dewan dan staf yang terpapar Covid-19. Apalagi setelah dilaporkan ada 4 orang di Komisi V DPR yang meninggal dunia. Rapat-rapat akan digelar secara virtual.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Lazarus saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kmenterian PUPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/2).

"Kepala sekretariat (Sekretariat Komisi V) juga positif sekarang. Tadi kami sudah bincang-bincang dengan para pimpinan (Komisi V DPR RI) mungkin besok full virtual ya. Kami juga harus menjaga karena di PUPR di sini sudah banyak yang kena," kata Lazarus.

Ia menyebut, sudah ada 4 orang di Komisi V DPR RI yang meninggal dunia akibat Covid-19. Untuk itu, sebagai bentuk tanggung jawab moral, pihaknya ingin agar rapat selanjutnya dilakukan dengan daring secara penuh. "Di Komisi V ini ada empat yang gugur, Pak. Ter-

banyak dari komisi yang ada di DPR. Jadi kami ada tanggungjawab moral ya, untuk mengurangi tatap muka. Kita juga belum tahu tracking kepala sekretariat Komisi V DPR RI sudah positif, yang ketemu kita di mana. Minggu lalu full rapat di sini," ungkap politikus PDIP ini.

Sementara terkait rapat-rapat di Komisi V DPR masih harus diputuskan bersama di Komisi V DPR. Apalagi, di Kementerian PUPR juga sudah banyak yang terpapar. "Nanti akan kita putuskan bersama setelah rapat ini. Bisa saja dari Bapak (Sekjen PUPR), karena dari PUPR sudah banyak yang kena," katanya menambahkan.

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah membenarkan bahwa di Kementerian PURR banyak pegawai yang positif Covid-19. Bahkan sejauh ini, sudah 200 orang yang terpapar.

"Sehari 40 orang. Dan untuk hari ini sudah ada 200 orang," ungkap Zainal menjawab Lazarus.

Menurut Lazarus, pihaknya perlu mengambil sikap terkait perkembangan Covid-19 ini, sehingga pihaknya akan segera mengambil keputusan. "Situasinya sudah kita sikapi pak. Jangan menunggu parah baru kita mengambil sikap. Nanti kita ambil sikap apa satu orang saja di ruangan ini untuk memimpin rapat," tandas Lazarus. ● han

2 Polhukam

FOTO:ANT



LONJAKAN KASUS COVID-19

Tenaga kesehatan melakukan tes usap COVID-19 terhadap warga di GSI Lab (Genomik Solidaritas Indonesia), Cilandak, Jakarta, Kamis (3/2). Satgas Penanganan COVID-19 mencatat kenaikan kasus COVID-19 secara nasional melonjak menjadi 56 ribu kasus dalam satu pekan ini, dimana angka tersebut meningkat hingga 40 kali lipat jika dibandingkan dengan awal Januari lalu.

Kemenag Minta Data 198 Pesantren Terafiliasi Terorisme kepada BNPT

Orangtua diminta selektif memilih pesantren untuk anaknya. Pastikan yang dipilih memenuhi arkanul ma'had sebagaimana diatur dalam regulasi. Para pengasuhnya memiliki sanad keilmuan yang jelas.

JAKARTA (IM) - Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Ali Ramdhani men-

gatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan meminta

data t 198 pondok pesantren yang terafiliasi dengan jaringan terorisme. "Verifikasi juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi apakah nama yang terdapat BNPT itu adalah pesantren yang memiliki izin terdaftar dari Kementerian Agama," kata Dhani saat ditemui wartawan di Jakarta, Kamis (3/2).

Dhani mengatakan, hingga saat ini sekitar 36 ribu pesantren terdapat memiliki izin terdaftar

dari Kemenag. Meski, tidak semua pesantren yang ada saat ini memiliki izin dari Kemenag. "Karena itu, kami perlu klarifikasi dengan BNPT untuk memastikan data itu apakah semuanya pesantren yang terdaftar atau tidak," tuturnya.

Klarifikasi dan verifikasi juga penting dilakukan untuk memastikan pesantren yang teridentifikasi BNPT itu apakah memenuhi arkanul ma'had (rukun pesantren) atau tidak.

"Jika tidak terdaftar dan tidak memenuhi arkanul ma'had, tentu tidak bisa disebut pesantren, dan tidak boleh beroperasi atas nama pesantren," ujarnya.

"Jika teridentifikasi ada pesantren yang terdaftar dan terbukti berafiliasi dengan jaringan terorisme, tentu kita beri sanksi hingga pencabutan izin," katanya.

Sementara itu, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Waryono Abdul Ghafur menyampaikan beberapa unsur minimal pesantren yang disebut sebagai arkanul ma'had.

Rukun pesantren itu terdiri atas kiai yang menjadi figur teladan sekaligus pengasuh yang membimbing santri, santri

masjid atau musalla, serta kajian kitab kuning.

"Faktanya, dari sejumlah nama yang disebut BNPT, setelah kami cek, tidak semua masuk kategori pesantren. Makanya, kami koordinasi lebih lanjut dengan BNPT agar ada kesamaan data," ucapnya.

"Tata kelola pesantren saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Jadi posisi pesantren sekarang semakin kuat karena sudah ada rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi dari negara dengan tetap mempertahankan kekhasan dan kemandirian pesantren," ujarnya.

Terakhir, Waryono mengimbau kepada orangtua santri agar selektif saat akan menipikan putra-putrinya di pesantren. Orangtua perlu memastikan pesantren yang dipilih adalah lembaga pendidikan yang memenuhi arkanul ma'had sebagaimana diatur dalam regulasi. Para pengasuhnya memiliki sanad keilmuan yang jelas.

"Jangan over generalisasi juga. Ada ribuan pesantren yang bisa menjadi pilihan terbaik buat pendidikan anak-anak Indonesia," ujarnya. ● han

Tak Terima Dihukum 20 Tahun, Mantan Dirut PT Asabri Ajukan Upaya Hukum

JAKARTA (IM) - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri (Persero) periode 2012-Maret 2016, Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri,

merasa keberatan atas vonis 20 tahun yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terhadapnya.

Linda Susanti, sebagai wakil keluarga Adam akan mengajukan upaya hukum atas putusan majelis hakim dalam kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri. Hal ini sebagai upaya untuk meminta kepastian hukum yang pantas bagi Adam.

"Atas nama keluarga besar Adam Rachmat Damiri akan melakukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan harapan Adam Rachmat Damiri dan keluarga," ujar Linda dalam keterangannya kepada wartawan pada Rabu (2/2).

Linda menilai keputusan majelis hakim yang berdasarkan pada laporan pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan dan dana PT Asabri periode 2012-2019, tidak menemukan

adanya kerugian negara dari saham CNKO, LCGP, SIAP, dan MTN PRIMA JARINGAN.

"Oleh karenanya hitungan tersebut tidak bisa dijadikan dasar adanya kerugian Negara untuk menghukum terdakwa Adam Rachmat Damiri," tegas Linda.

Menurut Linda, laporan itu tidak memperhitungkan saham dan reksadana yang masih bernilai. Dia berujar laporan tersebut tidak memenuhi unsur nyata dan pasti berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Linda menjelaskan adanya keterangan saksi, Indah Kusumawati, terkait penempatan saham-saham milik PT ASABRI terjadi pada tahun 2017 itu Adam Damiri sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama PT ASABRI.

"Adam Damiri juga telah mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Investasi dan Keuangan untuk mengelola keuangan PT Asabri pada saat menjabat yang dibuktikan dengan surat keputusan Direksi. Adapun pendelegasian itu tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Tahun 2011 Nomor Kep/161-AS/XI/2011 tentang Organisasi

dan Tata Kerja PT ASABRI," tutur Linda.

Di sisi lain, Linda menganggap salah satu hakim anggota, Mulyono telah memberikan pernyataan dissenting opinion atau perbedaan pendapat.

"Hakim Mulyono menyatakan kerugian keuangan negara sebesar Rp22,7 triliun sebagaimana dihitung auditor BPK masih bersifat potensi serta tidak berdasar dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan," katanya.

Sementara itu, Linda beranggapan terkait vonis yang dijatuhkan majelis hakim 20 tahun, seolah tidak mempertingkatkan usia Adam Damiri yang menginjak 72 tahun. Selain itu, Linda menilai majelis hakim tidak mempertimbangkan kesehatan Adam Damiri yang selama ini berjuang melawan kanker usus.

"Kami atas nama keluarga juga meminta kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung, kiranya dapat mekulkan pengawasan terhadap proses hukum selanjutnya, agar dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga putusannya dapat memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya terhadap Adam Rachmat Damiri," kata Linda. ● han

Kemenhan Berencana Boyong 10 Pesawat CN-235 Produk PT DI

JAKARTA (IM) - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo mengungkapkan bahwa Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana memboyong 10 pesawat CN-235 produksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PT DI.

Hal ini disampaikannya saat menyaksikan penandatanganan MoU tentang kerja sama penjualan dan pengembangan CN-235 antara PT DI dengan Jet Investment Group SARL, di Hanggar Fixed Wing Final Assembly Line, PT DI, Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/2).

"Telah direncanakan pembelian 10 CN-235 produksi PT DI yang merupakan pesawat multirole oleh pemerintah Indonesia," kata Prabowo dalam keterangan tertulis, Rabu (2/2).

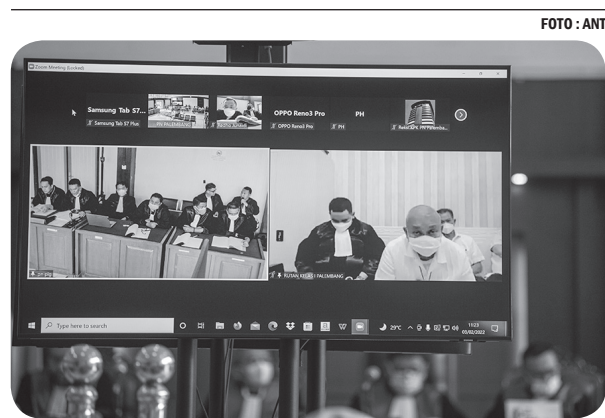
Dengan rencana pembelian ini, Prabowo berharap PT DI dapat meningkatkan kapasitas produksinya. Dari yang saat ini empat unit per tahun menjadi 24 unit pada

tiga tahun mendatang. Untuk meningkatkan kapasitas industri pertahanan dalam negeri, Kemenhan terus mendukung dengan memaksimalkan kespakatan Transfer of Technology (ToT) dan offset dari negara lain.

"Kita boleh beli sebagian ke negara mitra di luar negeri, tetapi syaratnya ada ToT dan offset. Dia harus membantu mengembangkan PTDI. Dia harus investasi di sini," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, beberapa negara menyatakan minat terhadap pesawat CN-235. Misalnya, Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, dan beberapa negara Asia dan Eropa. Menurut Prabowo, momentum ini harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh PT DI.

"Saya dukung penuh kerja sama dalam rangka memasarkan produk-produk PT DI terutama CN-235 ke pasar internasional," katanya. ● mei



SIDANG DAKWAAN ALEX NOERDIN

Layar televisi menampilkan tersangka mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin di Pengadilan Tipikor Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (3/2). Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan Jaksa Kejati Provinsi Sumatera Selatan mengenai dugaan korupsi pembelian gas bumi Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) dan korupsi proyek pembangunan Masjid Raya Palembang.

Heboh!Lautan Manusia Nonton Barongsai di Bandung, Tanpa Prokes Sama Sekali

BANDUNG (IM) - Lautan manusia tumpah ruang menonton pertunjukan barongsai di Mall Citylink Kota Bandung. Dari video yang tersebar di media sosial, lautan manusia tersebut sama sekali tak mengindahkan protokol kesehatan (prokes). Video yang viral itu pun langsung ditanggapi Pemerintah Kota Bandung. Pemkot langsung memanggil pengelola Mall Citylink terkait acara saat perayaan Imlek tersebut.

Plt Walikota Bandung, Yana Mulyana, menyesalkan kerumunan pengunjung di Mall Citylink saat pertunjukan barongsai di moment perayaan Imlek pada hari Selasa (1/2) kemarin. Pemkot

Bandung mengaku sudah menindak termasuk akan melakukan pemanggilan kepada pihak manajemen mall Citylink, berkenaan dengan sanksi yang akan diberikan. "Kami memastikan tidak pernah memberikan izin kegiatan terhadap acara tersebut. Kami pinta semua mall tidak menyelenggarakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan," jelasnya.

Sementara itu, dari data yang tercatat di Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagin) Kota Bandung, ada tiga mall yang tercatat telah melanggar protokol kesehatan dengan menyelenggarakan acara pada perayaan imlek, salah satunya Citylink. ● mei



EVALUASI PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI SEKOLAH

Siswa Sekolah Dasar Negeri Cilandak Barat 07 mengikuti kegiatan belajar mengajar tatap muka di kawasan Cilandak, Jakarta, Kamis (3/2). Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi, terutama di 3 provinsi, termasuk DKI Jakarta karena temuan kasus Corona hampir menyentuh angka 100 hingga 25 Januari.

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ('KIK') DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND ('SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND')

Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang telah diumumkan melalui surat kabar "International Media" tertanggal 17 Desember 2021, kami, PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi dari SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND, dengan ini mengumumkan bahwa telah dilaksanakannya perubahan KIK dan Prospektus SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND sehubungan dengan ketentuan penerapan ketentuan Kelas Unit Penyertaan, sebagaimana termaktub dalam akta addendum SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND.

Adapun rincian perubahan ketentuan tersebut dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA Jakarta, 4 Februari 2022
Manajer Investasi
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND
PT Syailendra Capital
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan